

## **STRATEGI MENGANTISIPASI POLITIK SARA PADA PEMILU MELALUI PENDIDIKAN POLITIK**

### **STRATEGY TO ANTICIPATE SARA POLITICS IN THE ELECTION THROUGH POLITICAL EDUCATION**

**Pipit Widiatmaka<sup>1a</sup>, Erna Yuliandari<sup>2b</sup>**

<sup>1</sup> Insititut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>a</sup>Email: [pipit.widiatmaka.pkn@gmail.com](mailto:pipit.widiatmaka.pkn@gmail.com)

<sup>b</sup>Email: [ernayuliandari@staff.uns.ac.id](mailto:ernayuliandari@staff.uns.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi konflik natar etnis dan agama, karena mudah terprovokasi dengan maraknya isu SARA di dalam pemilu beberapa tahun terakhir. Peran pendidikan politik sangat penting dan menjadi solusi utama untuk mengantisipasi maraknya isu SARA dalam pemilu Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu, Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran pendidikan politik, fenomena pendidikan politik di Provinsi Kalimantan Barat, strategi untuk mengantisipasi isu SARA dalam Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, dan implikasi terhadap kerukunan antar perbedaan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ialah kepustakaan. Teknik pengambilan data dengan studi dokumentasi, dan analisis data menggunakan analisis isi. Pendidikan politik merupakan suatu wahana untuk memberikan pengetahuan dan menyadarkan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu SARA di dalam pemilu. Apabila masyarakat Provinsi Kalimantan Barat memahami politik (melek politik), maka dapat mengantisipasi konflik antar etnis dan agama dan akan berimplikasi pada keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara serta akan meningkatkan kualitas pemilu di Provinsi Kalimantan Barat yang rahasia, terbuka, jujur, dan adil. Kenyaman dan keharmonisan hidup tanpa isu SARA dan tanpa memandang perbedaan latar belakang merupakan suatu cita-cita masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.

**Kata kunci:** Politik SARA; Pemilu; Pendidikan Politik

#### **ABSTRACT**

*West Kalimantan is one of the areas where ethnic and religious conflict often occurs because it is easily provoked by the rise of the issue of SARA in elections in recent years. The role of political education is very important and is the main solution to anticipate the rise of the issue of SARA in elections in West Kalimantan. Political education is a vehicle to provide knowledge and make people in West Kalimantan aware so that they are not easily provoked by*



*the issue of SARA in elections. This research aims to find out the role of political education, the phenomenon of political education in West Kalimantan, strategies to anticipate SARA issues in elections in West Kalimantan, and the implications for harmony between differences in West Kalimantan. This study uses a qualitative approach and the type of research is literature. The technique of collecting data is by studying documentation and analyzing the data by using content analysis (content analysis). Suppose the people of West Kalimantan understand politics (political literacy). In that case, they can anticipate conflicts between ethnicities and religions will have implications for the harmony of national and state life. They will improve the quality of elections in West Kalimantan that are secret, open, honest and fair. A comfortable and harmonious life without SARA issues and regardless of differences in the background is the ideal of the people of West Kalimantan.*

**Keywords:** SARA Politics; Elections; Political Education

## PENDAHULUAN

Dasar hukum bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi tercantum di dalam konstitusi UUD 1945 pasal 1 ayat 3, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau rakyat harus berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama. Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat menjadi suatu teori dari Abraham Lincoln yang dianut oleh Indonesia untuk mengatur pemerintahan sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum setiap lima tahun. Pencalonan tersebut harus melalui partai politik, hal ini sudah diatur di dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan turunannya berupa Undang-Undang (Zuhro, 2019).

Indonesia sebagai negara demokrasi selalu menyelenggarakan pemilu dari lingkup lokal hingga nasional secara rutin dan berkala, hal

tersebut dilakukan karena terselenggaranya pemilu merupakan salah satu indikator dari negara demokrasi. Pemilu menjadi ujung tombak untuk menghindari kekuasaan seperti yang terjadi di negara monarkhi, yang kekuasaannya dapat diturunkan kepada anak keturunannya. Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara demokratis, yang semua calon pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyat (*one man one vote*), namun di dalam proses pemilihan umum banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon pemimpin, misal *money politic*, saling menjatuhkan nama baik dengan berbagai cara, dan lain sebagainya (Santoso & Budhiati, 2021). Fenomena yang sering terjadi untuk menjatuhkan nama baik lawan politik agar terpilih menjadi pemimpin dalam pemilu, ialah mengangkat isu SARA (etnis, agama, ras, dan antar golongan), mengingat Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki keberagaman etnis, agama, ras, agama dan lain-lain. Masyarakat Indonesia mudah diprovokasi menggunakan isu SARA, sehingga terjadilah suatu konflik hingga berujung pada tindakan

kekerasan antar pendukung calon pemimpin. Pada dasarnya Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat serius dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa (Fatkhuri, 2021).

Peristiwa konflik antar pendukung dengan mengangkat isu SARA di dalam pemilu sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, entah menggunakan isu agama, etnis, ras dan lain sebagainya. Pada Pilkada serentak tahun 2020, anggota Bawaslu mengungkapkan bahwa para calon kepala daerah dan pendukungnya masih memanfaatkan isu politik identitas atau isu SARA untuk menyerang lawannya. Ada beberapa wilayah yang calon kepala daerah dan pendukungnya masih mengangkat isu SARA, yang merusak kualitas demokrasi di Indonesia, seperti di Kota Depok, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Solok dan lain sebagainya. Pilkada serentak tahun 2020 dari data Bawaslu terdapat 18 peristiwa yang masuk dalam kategori tingkat kerawanan yang sedang dan 236 peristiwa yang masuk dalam kategori tingkat kerawanan yang tergolong rendah (Humas Balitbang Hukum dan HAM, 2020). Seorang peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif mengungkapkan politik SARA dan netralitas seorang PNS atau ASN atau TNI/Polri masih menjadi permasalahan pemilu di Indonesia dan hal tersebut akan berpotensi muncul kembali di setiap Pemilu. Hal tersebut merupakan masalah klasik yang hingga sekarang sudah *mendarah daging* pada Pemilu di Indonesia, dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Saputra, 2021). Pemilu di Indonesia

selalu diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi, karena dapat merusak demokrasi di Indonesia.

Fenomena tersebut salah satu indikator yang membuat indeks demokrasi di Indonesia menjadi menurun, apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Data dari *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan skor indeks demokrasi Indonesia 6,3, yang sebelumnya memiliki skor 6,48 (Welle, 2021). Fenomena ini pada dasarnya menjatuhkan nama baik negara Indonesia di negara-negara tetangga bahkan di dunia, karena masih banyak orang yang memiliki kepentingan politik yang menghalalkan segala cara dalam pemilu khususnya pilkada untuk menjadi seorang pemimpin. Direktur Eksekutif Perludem mengungkapkan bahwa banyaknya terjadi politik yang memiliki nuansa SARA, dan politik identitas di dalam pilkada karena terlalu lemah kaderisasi yang dilakukan partai politik sehingga banyak tim sukses melakukan tindakan yang dapat memecah belah keharmonisan kerukunan antar agama, etnis, ras dan lain sebagainya. Media sosial menjadi alat untuk menyebarluaskan berita bohong oleh tim sukses untuk menyerang tim lawan. Data menunjukkan di tahun 2017 Indonesia adalah pengguna facebook terbesar keempat di dunia (132 juta jiwa pengguna facebook), dan *platform* tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu ketika Pilkada serentak untuk menyebarkan berita yang bernuansa SARA, seperti fitnah, politisasi SARA, menyebar berita *hoax* dan lain sebagainya (Yuliani, 2017).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang ketika diselenggarakan pemilu masih ada yang memanfaatkan keindahan keberagaman agama, etnis, ras dan lain-lain untuk kepentingan politik, sehingga hampir setiap diselenggarakan pesta demokrasi terjadi konflik antar pendukung calon pemimpin hingga berujung pada tindakan kekerasan (Widiatmaka, Purwoko, & Shofa, 2022). Afifudin seorang anggota Bawaslu mengungkapkan bahwa berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu pada Pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat sangat kental dengan isu politik identitas atau isu SARA dan sangat rentan terhadap konflik (Firmansyah, 2018). Pada dasarnya Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang paling banyak memiliki keberagaman etnis, ras, agama, dan lain-lain, apabila dibandingkan dengan wilayah lain (Widiatmaka, Gafallo, Akbar, & Adiansyah, 2023), namun keberagaman tersebut menjadi *boomerang* bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat karena elit politik merusak kerukunan masyarakat demi tercapainya kepentingan politik di pilkada.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Jumadi dan Yakoop pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ketika diselenggarannya pemilu politik identitas etnis dan agama di Provinsi Kalimantan Barat semakin meningkat sehingga menimbulkan ketegangan antar etnis Dayak dengan Melayu. Agama dan etnis menjadi instrumen politik untuk memenagkan di dalam pemilu, sehingga hal tersebut menimbulkan rasa ketakutan pada

masyarakat terutama pada etnis pendatang (Jumadi & Yakoop, 2013). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ismail Ruslan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki masa lalu yang sangat memprihatikan terkait pilkada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019, karena dislimuti dengan kebencian, fitnah dan kecurigaan antar etnis dan agama hingga berujung pada konflik antar etnis dan agama. Bahkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta imbasnya hingga sampai ke Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut bisa terjadi karena media sosial menyajikan berita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan masyarakat mudah terprovokasi dengan berita bohong (Ruslan, 2020).

Fenomena tersebut, pada dasarnya merupakan suatu kejahatan atau tindakan pidana, karena merupakan tindakan yang melawan hukum, sehingga harus ditindak secara tegas (Sazali, 2021). Derasnya arus politik yang bernuansa SARA dapat menimbulkan disintegrasi nasional dan dapat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu khususnya pilkada menjadi lemah (Permana & Handriana, 2020). Hal ini dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi Kalimantan Barat, selain dapat menimbulkan konflik antar etnis atau agama, juga dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Kalimantan Barat menjadi lemah sehingga akan menjadi kendala di dalam kehidupan demokrasi di Provinsi tersebut.

Politik identitas pada pilkada tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat seiring berjalannya waktu

semakin menguat, sehingga terjadilah polarisasi antar etnis dan juga antar agama serta berimplikasi pada munculnya primordialisme sehingga muncul suatu pernyataan dari masyarakat yang menyatakan “pemimpin terbaik di Kalimantan Barat dari etnis dan dari agama kami”. Pasca pilkada suasana kebencian dan permusuhan masih membekas hampir di setiap etnis di Provinsi Kalimantan Barat sehingga hal ini akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks apabila tidak segera diantisipasi (Ruslan, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat mudah terprovokasi dengan mengangkat isu SARA, sehingga dibutuhkan suatu tindakan, seperti pendidikan politik agar di pemilu mendatang tidak terjadi isu SARA ketika pemilu digelar dan masyarakat lebih cerdas di dalam merespon berita yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk mengetahui 1) fenomena pendidikan politik di Provinsi Kalimantan Barat, 2) strategi pendidikan politik dalam mengantisipasi isu SARA di dalam pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, dan 3) implikasi dari pendidikan politik dalam mengantisipasi isu SARA di dalam pemilu terhadap kerukunan antar perbedaan di Provinsi Kalimantan Barat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis permasalahan terkait maraknya isu SARA yang terjadi pada

Pilkada tahun 2018, Pemilu tahun 2019 dan Pilukada tahun 2020.

Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan oleh penulis adalah studi kepustakaan, sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ensiklopedia, artikel jurnal ilmiah, buku (*e-book*), prosiding seminar, media online dan media cetak, majalah, tesis, disertasi, skripsi dan lain sebagainya (Zed, 2014). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengambilan data dengan mengkaji sesuatu secara teoritis, referensi dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan nilai, kebudayaan, aturan-aturan tertentu atau norma yang berkembang di dalam permasalahan sosial yang diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Proses di dalam penelitian kepustakaan ini memiliki beberapa langkah, yaitu 1) menentukan topik penelitian, 2) Mengumpulkan data, 3) fokus pada obyek penelitian, 4) mencari dokumen dan mengklasifikasikan dokumen tersebut, 5) membuat catatan penelitian, 6) melakukan *review*, 7) mengklasifikasikan data kembali dan membuat laporan (Zed, 2004).

Analisis data yang digunakan ialah analisis konten, di dalam proses analisis tersebut memiliki beberapa langkah, yaitu 1) menyatukan data yang diperoleh, 2) menentukan atau memilah data, 3) menelaah data dengan memberikan kode di setiap data, 4) penyederhanaan data, 5) kesimpulan, dan 6) Penarasan (Moleong, 2021). Kesimpulan dalam kajian ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak, yaitu pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Pendidikan Politik di Provinsi Kalimantan Barat

Pendidikan politik merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk membangun orientasi politik, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan politik terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik. Pada dasarnya pendidikan politik untuk mendidik masyarakat mengenai politik sehingga setiap masyarakat sadar akan politik dan dapat bertanggung jawab (Mendrofa, 2024)

Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai macam etnis dayak, melayu, bugis, madura, batak hingga jawa. Agama yang dianut oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat sangat beragam dari agama Islam hingga Konguchu serta ada aliran kepercayaan yang dianut oleh beberapa penduduk di Provinsi Kalimantan Barat (Sutianti, 2020).

Berikut jumlah penduduk berdasarkan agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 1. Jumlah Pemeluk Agama dan Aliran Kepercayaan di Provinsi Kalimantan Barat

| No            | Agama              | Jumlah Penduduk  | Presentase (%) |
|---------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1             | Islam              | 3.251.481        | 59,91          |
| 2             | Protestan          | 623.839          | 11,49          |
| 3             | Katolik            | 1.203.137        | 22,17          |
| 4             | Hindu              | 2.998            | 0,06           |
| 5             | Budha              | 330.638          | 6,09           |
| 6             | Konguchu           | 13.093           | 0,24           |
| 7             | Aliran Kepercayaan | 1.889            | 0,03           |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>5.427.075</b> | <b>100</b>     |

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, (2019)

Berdasarkan tabel 1 tersebut tampak bahwa masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat sangat majemuk sehingga tidak dipungkiri rentan terhadap konflik terutama ketika diselenggarakan pemilu atau pilkada (Nuryadi & Widiatmaka, 2022). Hal tersebut bisa terjadi karena tim sukses calon pemimpin melakukan kampanye

dengan mengangkat isu SARA terutama melalui media sosial (facebook, telegram, instagram, watshaap dan lain sebagainya). Pada tahun 2020 hingga 2022 Indonesia mengalami bencana non alamiah berupa pandemi covid-19 yang mempengaruhi pola kampanye calon pemimpin di pemilu, yaitu dengan

memanfaatkan media sosial sebagai fasilitas untuk kampanye, namun apabila media tersebut dimanfaatkan dengan cara negatif, maka isu SARA akan semakin mudah disebarkan dan potensi konflik antar etnis dan agama semakin besar (Aji, 2020). Fenomena tersebut menjadi sutau evaluasi dan juga tantangan penyelenggaraan pemilu selanjutnya, khususnya pilkada, sehingga dibutuhkan suatu strategi agar kampanye yang bernuansa SARA tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data dari *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan indeks demokrasi

Indonesia di tahun 2020 mendapatkan skor rata-rata 5,37 yang tahun sebelumnya mendapatkan skor rata-rata 5,44 (Wibowo, 2021). Skor tersebut ternyata merupakan nilai terendah sejak 14 tahun terakhir, hal ini menjadi mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi di Indonesia mengingat banyak konflik antar etnis dan agama ketika dilenggarakannya pemilu, seperti di Provinsi Kalimantan Barat sehingga pendidikan politik harus dilaksanakan dengan maksimal dan merata. Berikut data indek demokrasi di Provinsi Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 2. Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat Menurut Variabel Tahun 2018-2020

| No | Variabel                                                       | Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat Menurut Variabel |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                | 2018                                                        | 2019  | 2020  |
| 1. | Hak memilih dan dipilih                                        | 90,63                                                       | 53,13 | 95,31 |
| 2. | Kebebasan berkumpul dan berserikat                             | 85,39                                                       | 86,12 | 93,74 |
| 3. | Kebebasan Berpendapat                                          | 96,92                                                       | 100   | 98,94 |
| 4. | Kebebasan dari Diskriminasi                                    | 90,86                                                       | 90,86 | 93,47 |
| 5. | Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan | 75,78                                                       | 82,62 | 82,62 |
| 6. | Pemilu yang bebas dan adil                                     | 52,25                                                       | 60,28 | 58,94 |
| 7. | Peran Birokrasi Pemerintah daerah                              | 100                                                         | 70,80 | 70,80 |
| 8. | Peran DPRD                                                     | 54,05                                                       | 59,04 | 67,77 |
| 9. | Peran partai politik                                           | 22,86                                                       | 61,43 | 74,29 |

Sumber: Badan Pusat Stastitika (2021)

Berdasarkan tabel 2 tersebut terlihat bahwa data data dari keseluruhan variabel indeks demokrasi di Kalimantan naik-turun, sehingga hal ini menhjadi pekerjaan rumah bagi seluruh komponen masyarakat, tidak

hanya pemerintah saja melankan juga masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Namun, apabila melihat dari variabel hak dipilih dan memilih di tahun 2019 menurun, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di Provinsi

Kalimantan Barat di tahun 2019 menurun, adalah tahun 2019 merupakan tahun pesta demokrasi atau bertepatan dengan pemilu 2019. Di sisi lain, Pada pemilu 2019 yang lalu ketika diselenggarakan secara serentak untuk memilih presiden, DPR, dan DPD, isu SARA menjadi komoditas yang sangat luar biasa sehingga berimplikasi pada timbulnya polarisasi di masyarakat (Sirait, 2020).

Di Provinsi Kalimantan Barat ternyata ketika pemilu 2019 juga terjadi polarisasi antar etnis dan agama hingga sekarang masih membekas. Hal ini harus segera diantisipasi melalui pendidikan politik agar partisipasi politik di pemilu mendatang meningkat dan dapat memilih pemimpin yang berintegritas dan tanggung jawab (Nuryadi & Widiatmaka, 2022). Peristiwa yang lain terjadi di Pilkada di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 yang lalu, salah satu desa di Kabupaten tersebut memilih untuk golput dalam pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak memberikan hak masyarakat berupa pelayanan listrik (AB, 2020).

Peristiwa tersebut tidak dapat dipungkiri sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mengingat banyak oknum dari pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, terutama ketika akan diselenggarakan pemilu (Haliim, 2020). Fenomena ini akan menjadi mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia, karena masyarakat bersikap apatis terhadap pemilu, sehingga pemerintah harus segera memberikan hak kepada

masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan politik. Selain itu, pemerintah daerah harus dapat bekerja sama dengan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan pendidikan politik melalui kegiatan-kegiatan seperti pagelaran seni dan budaya hingga upacara adat di setiap daerah. Apabila pendidikan politik dapat diimplementasikan dengan maksimal, tidak hanya dapat membangun keharmonisan kehidupan saja, melainkan juga dapat membentuk *good governance* (pemerintahan yang baik). *Good governance* merupakan cita-cita setiap negara di dunia khususnya di Indonesia (Habibi & Untari, 2018).

Pendidikan politik di Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya sudah sering dilakukan baik melalui Pendidikan politik melalui jalur pendidikan formal dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta pembelajaran yang lainnya, sedangkan pendidikan non formal dilakukan melalui beragam kegiatan seperti sosialisasi, pementasan seni dan drama, kegiatan upacara adat dan lain sebagainya (Nurdin, 2019). Misal Kesbangpol Kabupaten Landak menyelenggarakan pendidikan politik untuk memilih pemula melalui kegiatan sosialisasi pemilu. Hal tersebut dilakukan oleh Kesbangpol agar pemilu mendatang tidak terjadi politik uang dan politik SARA, sehingga pemilu terselenggara dengan aman dan damai. Sasaran Kesbangpol saat ini adalah memilih pemula yang merupakan generasi milenial yang tidak bisa lepas dengan ponselnya untuk mengakses media sosial. Hal ini dilakukan karena banyak berkembang

berita terkait isu SARA di media sosial yang dapat menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat dan harapannya pemilih pemula tidak terprovokasi dengan berita-berita tersebut (Oxtora, 2022).

Kesbangpol Kota Pontianak juga menyelenggarakan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula, yang disasar adalah siswa-siswa yang memiliki hak pilih di pemilu. Hal ini dilakukan karena di Provinsi Kalimantan Barat sering terjadi konflik antar pemuda dengan mengangkat isu-isu SARA, seperti konflik antar etnis. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kerukunan antar perbedaan dan pemilu serta pilkada yang aman dan kondusif (Sumiati, 2022). Di Kabupaten Sekadau Kesbangpol Kabupaten Sekadau juga menyelenggarakan sosialisasi pendidikan politik untuk membangun masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban serta mampu berpolitik secara baik dan santun (Rakyat Borneo, 2022). Selain itu, pendidikan politik juga dilakukan oleh masyarakat adat Dayak dengan pentas seni di Kabupaten Ketapang, pentas seni tersebut diselenggarakan agar masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan seni budaya di setiap daerah merupakan suatu keniscayaan sehingga keharmonisan kehidupan antar suku dan agama dapat terjalin dengan baik serta tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas terutama ketika akan diselenggarakannya pemilu atau pilkada (Sri, 2022).

Pendidikan politik di Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya sudah sering dilaksanakan melalui beragam kegiatan, seperti sosialisasi, pentas seni

budaya, dan lain sebagainya. Pendidikan politik di Provinsi Kalimantan Barat dapat meminimalisir isu-isu SARA yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, namun ketika akan diselenggarakan pemilu atau pilkada isu-isu tersebut sering muncul melalui media sosial, sehingga menimbulkan konflik antar perbedaan di Provinsi Kalimantan Barat.

### **Strategi untuk Mengantisipasi Isu SARA dalam Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat**

Penyelenggaraan pendidikan politik di Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah desa dengan baik, dengan cara memberikan sosialisasi melalui kegiatan rapat RT atau RW, kemudian melalui kegiatan PKK dan juga dapat dilakukan ketika ada kegiatan di kantor pemerintah desa (Mujiono, 2022). Pendidikan politik merupakan suatu proses untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan terkait politik sehingga dapat menciptakan lingkungan yang demokratis (Mendrofa, 2024).

Pendidikan politik sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat memahami politik atau melekat politik, sehingga setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat tidak mudah terprovokasi yang berujung pada konflik antar etnis maupun agama. Pendidikan politik sangat perlu dilakukan, mengingat partai politik saat ini tidak melaksanakan pendidikan politik

dengan baik, sehingga para kader-kadernya melakukan politik praktis yang bernuansa SARA, sehingga dapat menimbulkan konflik antar etnis dan juga antar agama sehingga membuat indeks kualitas demokrasi di Indonesia menjadi menurun khususnya di Provinsi Kalimantan Barat (Nuryadi & Widiatmaka, 2022).

Pendidikan politik sangat penting diimplementasikan di Provinsi Kalimantan Barat, karena setiap diselenggarakannya pemilu atau pilkada sering terjadi konflik antar perbedaan dan juga politik uang, namun hal tersebut tidak hanya terjadi di Provinsi Kalimantan Barat bahkan hampir di seluruh provinsi atau wilayah di Indonesia. Melek politik atau memahami politik adalah salah satu kunci penting dalam menjaga kerukunan antar perbedaan terutama ketika akan diselenggarakannya pemilu. Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan memahami politik atau melek politik, ketika sudah mengesuai beberapa indikator, yaitu 1) memahami dan mengetahui berita atau informasi terkait pemegang kekuasaan atau pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota dan lain-lain) dan memahami bagaimana institusi pemerintahan bekerja, 2) memiliki strategi untuk terlibat secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan yang dikuasainya untuk kepentingan umum, 3) mampu memprediksi terkait dampak dari kebijakan pemerintah, 4) memahami tujuan kebijakan yang diputuskan dan dikeluarkan oleh pemerintah, apakah untuk memecahkan suatu permasalahan atau sebaliknya, dan 5) mampu menerima pendapat orang lain dan juga evaluasi

diri terkait apa yang dilakukan (Nurdiansyah, 2015). Masyarakat harus dapat memahami tentang politik agar tidak mudah diprovokasi oleh oknum tertentu, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang rentan terhadap konflik horizontal, selain itu masyarakat juga dapat memberikan saran atau kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Strategi yang harus dilakukan untuk mengantisipasi isu SARA dalam pemilu di Kalimantan yaitu 1) memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh masyarakat bahwa perbedaan merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima oleh seluruh umat manusia khususnya masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perbedaan tersebut harus selalu dijaga dan dirawat dengan baik serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, 2) pemerintah harus membuat kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat tanpa adanya diskriminasi serta jangan sampai kebijakan tersebut berdampak pada terjadinya konflik horizontal maupun vertical di tengah masyarakat, 3) Selalu dilakukan secara konsisten dan rutin kegiatan-kegiatan pendidikan politik memalui beragam kegiatan, seperti pentas seni, drama dan budaya, upacara adat, sosialisasi yang dilakukan pemerintah atau organisasi tertentu dan lain sebagainya, 4) Melupakan peristiwa konflik yang telah berlalu demi kerukunan antar perbedaan, seperti peristiwa di Sambas, 5) penyelenggara dan pengawas pemilu bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, 6) elit politik jangan

memprovokasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, hanya karena mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Pendidikan politik melalui beragam kegiatan merupakan wahan yang sangat penting dan harus diimplementasikan di setiap daerah di Provinsi Kalimantan Barat agar kerukunan antar perbedaan terjalin dengan baik terutama ketika akan diselenggarakan pemilu dan pilkada. Pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerja sama untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang baik, sehingga konflik antar perbedaan di Provinsi Kalimantan Barat dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dan keharmonisan kehidupan masyarakat dapat terjaga dan terawat dengan baik, meskipun memiliki perbedaan latar belakang.

### **Implikasinya terhadap Kerukunan antar Perbedaan di Provinsi Kalimantan Barat**

Kerukunan antar sesama menjadi tujuan utama berdirinya negara Indonesia, yang melepaskan perbedaan latar belakang sehingga memiliki tujuan yang sama yaitu persatuan dan kesatuan. Di negara multikultural sangat sulit untuk menyatukan masyarakat yang memiliki perbedaan etnis, agama, ras, budaya dan lain-lain, namun Indonesia memiliki sejarah yang menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan sehingga Indonesia menjadi negara yang merdeka hingga sekarang. Bung Karno pernah menyampaikan bahwa musuh terberat suatu bangsa adalah bangsanya sendiri, dan ternyata saat ini pernyataan Bung Karno tersebut terjadi, karena banyak

pengkhianat bangsa yang memanfaatkan masyarakat Indonesia hingga terjadi polarisasi demi tercapainya tujuan politik atau tujuan pribadinya, seperti korupsi, oknum pemerintah membuat kebijakan yang tujuannya membuat konflik antar etnis atau agama dan lain sebagainya. Politik praktis bernuansa SARA menjadi penyakit bangsa Indonesia hingga saat ini, karena setiap diselenggarakannya pemilu para oknum elit politik selalu mengangkat isu SARA untuk mencapai tujuannya.

Politik praktis yang bernuansa SARA di dalam pemilu ternyata dapat memprovokasi masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Barat sehingga timbul suatu konflik antar etnis atau antar agama. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Barat belum memahami politik atau meleak politik sehingga mudah diprovokasi oleh oknum tertentu melalui media sosial. Pendidikan politik menjadi salah satu solusi agar masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat memahami politik atau meleak politik sehingga tidak mudah diadu domba. Pendidikan politik dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, sehingga pendidikan politik tidak hanya dapat dilakukan melalui pendidikan formal saja. Apabila masyarakat Provinsi Kalimantan Barat mengetahui dan memahami politik atau meleak politik tidak akan mudah diprovokasi oleh oknum tertentu sehingga dapat mengantisipasi konflik antar sesama (antar etnis dan antar agama) (Rianto & Rohani, 2019). Meleak politik pada dasarnya memiliki

implikasi yang sangat besar bagi kerukunan antar perbedaan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya antar etnis dan antar agama.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama pada tahun 2018 ada enam isu actual yang mempengaruhi kerukunan antar perbedaan, yaitu bantuan sosial, pelanggaran symbol agama, Kebijakan dari pemerintah daerah, terorisme, isu SARA dalam Pemilu, dan isu komunis dan tenaga kerja asing (Muntafa, 2019). Isu SARA dalam pemilu menjadi salah satu yang mempengaruhi kerukunan antar perbedaan. Hal ini menunjukkan suatu yang sangat penting karena menjadi fokus utama dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Pendidikan politik menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi isu SARA dalam pilkada maupun pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga keharmonisan kehidupan antar perbedaan di wilayah tersebut dapat terjaga dan terawat dengan baik (Atmaja, Sulistyarini, & Dewantara, 2020).

Pendidikan politik pada dasarnya dapat mengantisipasi politik praktis yang bernuansa SARA pada pemilu, karena di dalam pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia, di dalam demokrasi terdapat suatu kesetaraan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanis) (Juditha, 2019). Nilai-nilai kemanusiaan di sisi tidak lepas dengan sikap toleransi, karena mengedepankan

sikap menghormati dan menghargai antar perbedaan, seperti etnis dan agama. Apabila masyarakat Provinsi Kalimantan Barat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan sikap toleransi, secara langsung maupun tidak langsung tidak akan mudah diprovokasi oleh oknum tertentu terutama ketika pemilu digelar, sehingga keharmonisan kehidupan antar perbedaan dapat terwujud dan penyelenggaraan pemilu dapat diselenggarakan dengan baik dan kondusif atau bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pendidikan politik memberikan ruang demokrasi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan posisi masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pembuat kebijakan (eksekutif dan legislatif) dibawah kontrol masyarakat. Negara yang demokratis selalu berusaha untuk mewujudkan prinsip dan nilai demokrasi yang mengedepankan persamaan, kebebasan dan pluralisme, sehingga kerukunan dan persatuan di negara yang beragam dapat terwujud (Masamah, 2016). persamaan dan kebebasan merupakan hak setiap warga negara, tanpa memandang perbedaan etnis dan agama menjadi kunci utama di negara demokrasi dan persatuan di atas perbedaan menjadi tujuan utama negara demokrasi seperti di Indonesia. Pemilu di negara demokrasi melarang secara keras kepada oknum tertentu mengangkat isu SARA, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan kualitas pemilu menjadi turun. Politik tanpa isu SARA khususnya di dalam pemilu dapat mengantisipasi disintegrasi nasional atau meminimalisir konflik antar etnis

maupun agama. Pendidikan politik memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kerukunan di Provinsi Kalimantan Barat karena merupakan wahana pendidikan yang memberikan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat terkait politik (melek politik) sehingga dapat mengantisipasi terjadinya politik praktis yang mengangkat isu SARA di dalam pemilu.

Kehidupan antar etnis dan agama di Provinsi Kalimantan Barat dapat terjalin dengan baik, apabila politik tanpa isu SARA di dalam pemilu dengan berpartisipasi secara aktif di dalam pemilu dan mengepankan sikap toleransi. Kerukunan antar perbedaan yang baik dapat diimplementasikan dengan cara 1) menjalin kehidupan tanpa adanya kecurigaan antar etnis maupun agama, 2) adanya semangat saling menghormati dan menghargai antar sesama, 3) terjalinnya kerja sama tanpa memandang perbedaan latar belakang, 4) saling berinteraksi dan membantu tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu (Rahmanika et al., 2018). Pemilu tanpa isu SARA menjadi impian setiap masyarakat di Indonesia demi terwujudnya keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Barat setiap ada pemilu isu SARA menjadi senjata oleh oknum tertentu untuk mencapai tujuan politiknya. Melalui pendidikan politik sebagai wahana untuk pemebeajaran masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat mengantisipasi maraknya isu-isu SARA yang menimbulkan polarisasi di masyarakat khususnya ketika akan diselenggarakan pemilu atau pilkada

sehingga keharmonisa kehidupan antar perbedaan (etnis dan agama) di wilayah tersebut dapat terwujud dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data pustaka, bahwa kekhawatiran terjadinya konflik dalam konteks kegiatan Pemilu sebagaimana yang dikemukakan pada pertanyaan masalah penelitian ini, dapat peneliti kemukakan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dari segi agama dan etnis, namun ketika penyelenggaraan pemilu dan pilkada sering terjadi konflik antar masyarakat, karena kampanye yang dilakukan oleh pihak calon selalu mengangkat isu-isu SARA. Maraknya isu SARA di Provinsi Kalimantan Barat dalam pemilu dan pilkada menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat khususnya konflik antar etnis dan agama. Hal tersebut berpotensi terjadinya disintegrasi nasional, namun pendidikan politik menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi maraknya isu SARA di dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Kalimantan Barat. Pendidikan politik merupakan suatu usaha secara terorganiser dan tersistematis dengan memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat tentang politik sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Barat melek politik. Pendidikan politik yang dilaksanakan baik yang melalui pendidikan formal melalui mata pelajaran kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh pendidikan formal, maupun pendidikan politik

nonformal yang biasanya maupun tidak turut membantu diselenggarakan oleh KPU maupun meredam terjadinya konflik dalam Bawaslu, dengan sasaran masyarakat penyelenggaraan pemilu di Indonesia. umum, ternyata baik langsung

## DAFTAR PUSTAKA

- AB. (2020). *Dusun Golput di Kalimantan Barat Jadi Sorotan*.
- Aji, M. P. (2020). Konstelasi Politik Di Tengah Pandemi Covid-19 (I). *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 179–194. <http://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v17i2.885>
- Atmaja, T. S., Sulistyarini, S., & Dewantara, J. A. (2020). Partisipasi Politik Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 47–58.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. (2019). *Profil Pembangunan Kalbar 2019*. Pontianak: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Demokrasi Kalbar Menurut Variabel 2018-2020.
- Fatkhuri. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan (Budaya) Bela Negara Di SD Katolik Karya Toboali Kepulauan Bangka Belitung. *INOVASI: Jurnal Politik Dan Kebijakan*, 18(2), 149–167. <http://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i2>
- Firmansyah, A. (2018). Kalimantan Barat Kental Isu SARA.
- Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 159–168.
- Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit. *INOVASI: Jurnal Politik Dan Kebijakan*, 17(1), 39–53. <http://doi.org/10.33626/inovasi.v17i1.136>
- Humas Balitbang Hukum dan HAM. (2020). Pilkada Serentak 2020 Masih diliputi Isu Politik Identitas dan SARA.
- Juditha, C. (2019). Komparasi Sentimen Isu SARA di Portal Berita Online dengan Media Sosial Menjelang Pemilu 2019 Comparison of SARA Issues Sentiment between Online News Portal and Social Media Towards the 2019 Election. *Jurnal Pekommas*, 4(1), 61–74.
- Jumadi & Yakoop, M. R. (2013). Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 17–34.
- Masamah, U. (2016). Pendidikan Islam, Pendidikan Politik, Dan Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 4(1), 1–19. <http://doi.org/https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1638>
- Mendrofa, D. E. K. (2024). Analisis Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiono. (2022). Manajemen Pendidikan Politik Masyarakat Perbatasan di Kalimantan

- Barat. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(1), 41–50.
- Muntafa, R. U. F. (2019). *Surve Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Tahun 2018. Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
- Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 2(implementasi pendidikan politik), 54–58.
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144–166.
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2022). Harmonisasi Antar Etnis dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah di Kalimantan Barat Pada Era Society 5 . 0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 101–119. <http://doi.org/10.22146/jkn.73046>
- Oxtora, R. (2022). *Pendidikan politik pilih pemula di Landak beri pengetahuan jelang pemilu 2024*.
- Permana, U., & Handriana, I. (2020). Pengaruh Politisasi SARA Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Untuk Mengikuti Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2), 126. <http://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.930>
- Rahmanika, K., Pratiwi, D. W., Santoso, A. P., HS, N. B., Susilowati, E., & Yunarta, F. (2018). Toleransi Antar Umat Beragama Di Kecamatan Prambanan. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 119–142.
- Rakyat Borneo. (2022). Kesbangpol Kembali Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat.
- Rianto, H., & Rohani. (2019). Peranan PKS Dalam Memberikan Pendidikan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018. *Untirta Civic Education Journal*, 4(2), 130–141.
- Ruslan, I. (2020). Pelintiran Kebencian (Hate Spin): Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat. *Al Hikmah*, 14(1), 189–212.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, M. G. (2021). *Politisasi Isu SARA dan Netralitas ASN Masih Potensial Terjadi di Pemilu 2024*.
- Sazali, H. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram. *INOVASI: Jurnal Politik Dan Kebijakan*, 18(1), 79–87. <http://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i1>
- Sirait, F. E. T. (2020). Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia). *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 179–190. <http://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.806>
- Sri. (2022). *Buka Secara Resmi Pentas Seni Budaya Dayak (PSBD) VIII Ketapang Kalimantan Barat, Martin Rantan Mengajak Masyarakat Bergandengan Tangan Agar Harmonis Dan Sejahtera*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati. (2022). *Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula*.
- Sutianti. (2020). *Dinamika Konflik Antar Etnis Dayak dan Etnis Madura di Samalantan*

- Kalimantan Barat. *Ijd-Demos*, 2(1), 90–107. <http://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.35>
- Welle, D. (2021). *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*.
- Wibowo, K. (2021). *Indeks Demokrasi Indonesia Turun*, Fadli Zon: Berdampak ke Penanganan Pandemi.
- Widiatmaka, P., Gafallo, M. F. Y., Akbar, T., & Adiansyah, A. (2023). Warung Kopi sebagai Ruang Publik untuk Membangun Harmoni Masyarakat Multikultural. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 65–76. <http://doi.org/https://doi.org/10.18784/smart.v9i1>
- Widiatmaka, P., Purwoko, A. A., & Shofa, A. M. A. (2022). Rumah Radakng dan Penanaman Nilai Toleransi di Masyarakat Adat Dayak. *Dialog*, 45(1), 57–68. <http://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.584>
- Yuliani, A. (2017). Ini Penyebab Maraknya Politik SARA.
- Zed, M. (2004). *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zed, M. (2014). *Metode Peneletian Kepustakaan* (3rd ed.). Yogyakarta: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81. <http://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>